



18/12/23

DARI PRESIDEN MENJADI NARAPIDANA: OTORITARIANISME & TINDAKAN KRIMINAL MANTAN PRESIDEN PERU, ALBERTO FUJIMORI

oleh:

Refi Leilita Febriani

Tindakan kriminalitas dapat dilakukan oleh siapa saja terlepas dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau bahkan tingkat pendidikan. Lalu bagaimana apabila kejahatan dilakukan oleh orang nomor satu di suatu negara? Hal inilah yang dilakukan oleh mantan Presiden Peru, Alberto Fujimori, yang menjabat pada tahun 1990 hingga 2000. Fujimori merupakan keturunan dari imigran Jepang dan merupakan seorang insinyur di bidang pertanian (bahkan pernah menjadi rektor universitas) sebelum terjun ke dunia politik. Di tengah gejolak krisis ekonomi, politik, dan sosial di Peru, dengan pendekatan yang mengarah kepada [populisme ekonomi](#), membuatnya memiliki daya tarik yang lebih tinggi dibanding rivalnya saat itu. Namun, tidak akan ada yang menyangka bahwa Fujimori akan dikenal dalam sejarah Peru sebagai kepala negara yang secara demokratis [diekstradisi ke negaranya sendiri](#), diadili atas pelanggaran HAM dan dihukum.

Kepemimpinan berasal dari genetika berupa bakat yang kemudian dipupuk dan dikembangkan melalui akumulasi pengalaman dalam kehidupan, dengan ditopang oleh [pengetahuan teoritikal](#). Dari banyaknya tipe kepemimpinan, tipe otoriter dinilai sebagai bentuk karakteristik yang negatif karena menghasilkan kepribadian yang otoriter. Kepribadian yang otoriter dalam lingkup politik dapat menjadi dasar bagi aktivitas kriminal, utamanya dalam konteks kekerasan sistemik, represi politik, atau bahkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu dalam posisi kekuasaan. Untuk memahami lebih rinci mengenai fenomena tersebut, Theodor Adorno (1950) mengembangkan teori yang dikenal sebagai *The Authoritarian Personality*. Teori inilah yang akan membantu kita memahami karakteristik dan motif dari kejahatan yang dilakukan Alberto Fujimori selama memimpin Peru dengan otoriter.

Pada tanggal 8 Agustus 1990, kurang dari dua minggu setelah dilantik, Fujimori memberlakukan langkah-langkah penghematan yang cukup ekstrim, termasuk menaikkan harga bensin hingga 3.000%. Kebijakan tersebut mendapat julukan sebagai ["Fujishock"](#). Namun, pendekatan yang dinilai berlebihan dan mengejutkan tersebut berhasil mengatasi inflasi tinggi di Peru saat itu. Dua tahun kemudian, pada 5 April 1992, Fujimori mengumumkan [autogolpe](#) (kudeta diri), dimana ia membubarkan kongres, menanggukkan konstitusi, dan mengambil alih peradilan dengan dukungan dari Vladimiro Montesinos, mantan kapten tentara. Hal tersebut membuatnya memiliki kuasa dan kontrol penuh atas institusi-institusi vital negara, termasuk militer. Sedikitnya dukungan kongres terhadap program-program Fujimori, memantik sifat tidak tolerannya sehingga mendorong perilaku yang represif. Dengan ketiadaan kongres dan sentralisasi wewenang, Fujimori semakin leluasa mengukuhkan legitimasi kekuasaannya dan menerapkan pengawasan ketat serta intimidasi ke seluruh negara, termasuk ke media.

Pemimpin yang [otoriter](#) menganggap organisasi sebagai milik pribadi, berperilaku arogan, dan mengembangkan sistem dimana keputusannya dianggap sah, dan pengikutnya wajib mengikuti dengan patuh. Hal ini juga yang diterapkan oleh Alberto Fujimori. Tahun-

18/12/23

tahun sebelum Fujimori menjabat, Peru secara konsisten berada dalam ancaman kudeta yang dilakukan oleh kelompok pemberontak yang dikenal sebagai *Shining Paths*, yang dipimpin oleh Abimael Guzman. Permasalahan ini tidak mampu diselesaikan oleh presiden-presiden sebelum Fujimori. Lalu ketika ia berkuasa, Fujimori membentuk suatu unit militer khusus bernama *Colina Group* pada pertengahan tahun 1991, yang bertugas untuk mengeliminasi berbagai ancaman terhadap pemerintahan. Pada kenyataannya, kelompok ini dianggap sebagai kaki tangan Fujimori dan bertanggung jawab dalam rentetan pembunuhan yang ditargetkan, penghilangan paksa, pengadilan teroris tertutup yang menyalahi konstitusi, dan pelanggaran HAM serius lainnya. Tindakan keras pemerintah otoriternya terhadap dua pemberontakan selama masa jabatannya mengakibatkan kematian sekitar [69.000 orang](#). Kasus yang paling terkenal adalah [pembunuhan La Cantuta dan Barrios Altos](#), dimana Fujimori dan 57 orang lainnya didakwa bertanggung jawab oleh Pengadilan Peru. Dengan pendekatan yang dogmatis dan agresif, Fujimori beranggapan bahwa pembentukan *Colina Group* merupakan upaya yang paling efektif dalam memusnahkan ancaman yang telah bertahun-tahun menghantui rakyat Peru dan jaminan bagi kepemimpinan yang tanpa ancaman. Meskipun begitu, partai oposisi terus memberikan kritik terhadap Fujimori atas upayanya yang selalu menghindari penyelidikan atas pemerintahannya.

Kebencian terhadap suatu kelompok atau etnis tertentu (*hate crime*) dapat menjadi salah satu faktor pendorong dari tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh pemimpin negara. Bagi Fujimori, oposisi yang tidak dibungkam merupakan ancaman nyata terhadap kepemimpinannya sehingga kekerasan terhadap mereka merupakan hal yang perlu ditegaskan. Oleh karena itu, Fujimori melakukan penculikan terhadap wartawan oposisi, Gustavo Gurruti, yang tegas melontarkan kritik terhadap kejahatan rezimnya. Ia juga terbukti melakukan pembunuhan terhadap pengusaha bernama Samuel Dyer.

Masa akhir kepemimpinan Fujimori tidak berakhir bahagia. Ia akhirnya berhasil diekstradisi dari Chili ke Peru setelah sebelumnya berkali-kali ditolak oleh Pemerintah Jepang ketika Fujimori kabur ke tanah leluhurnya. Dari sekitar 21 dakwaan yang dituduhkan Pengadilan Peru kepada Fujimori, paling banyak adalah menyangkut penggelapan dana pemerintah atau korupsi dan suap. Dalam banyak bukti dokumenter dan kesaksian, Fujimori menciptakan sistem yang rumit untuk mendistribusikan dana nasional terutama untuk keluarganya, dana kampanye, dan tujuan-tujuan ilegal lainnya. Mendekati akhir tahun 1990-an, kewenangan-kewenangan tersebut digunakan Fujimori untuk mendukung pencalonan ulangnya pada pemilihan tahun 2000, termasuk tindakan-tindakan kotor dibaliknya. Kecacatan administratif yang dibuat oleh Fujimori selama memimpin, telah membantunya untuk menciptakan struktur hierarkis yang sistematis dalam mendorong tindakan kriminalitas yang terorganisir dengan ia sebagai pemegang kuasanya. Alberto Fujimori divonis enam tahun penjara atas penyalahgunaan kekuasaan dan tuduhan korupsi pada 2007. Kemudian pada 2009, ia menghadapi tuduhan lain yaitu pelanggaran HAM yang membuatnya divonis 25 tahun penjara.